

## **Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi Kasus di Pasar Cikereteg Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor)**

Riska Yuliani<sup>1</sup>, Faisal Tri Ramdani<sup>2</sup>, Denny Hernawan<sup>3</sup>, Neng Virly Apriliyani<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Djuanda Bogor Jl Tol Ciawi No 1

\*Korespondensi: Faisal Tri Ramdani. Email: [faisaltr@unida.ac.id](mailto:faisaltr@unida.ac.id)

---

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Cikereteg Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Pasar Cikereteg Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor). Objek yang selalu menjadi salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia hal ini terkadang menjadi salah satu masalah yang belum pernah terselesaikan masalahnya mana hal ini membuat masyarakat menjadi terbiasa dengan keadaan jalanan macet. Mengenai implementasi kebijakan pemerintah terkait dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pemerintah dengan mempersiapkan lahan untuk para penjualan pedagang kaki lima akan tetapi masih saja pedagang yang melakukan penjualan di pinggir jalan. Penelitian ini khususnya menggunakan metode pendekatan kualitatif, teknik dalam pengumpulan data yang digunakan yakni metode pengamatan lapangan, dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini menunjukkan bahwa hasil kebijakan dari pemerintah sangat membantu bagi pedagang kaki lima yang khusus dibuatkan akan tetapi masih saja ada beberapa dari para pedagang yang masih berjualan di pinggir jalan dan beberapa faktor yang menjadi penghambat yang membuat pedagang menolak untuk di pindahkan dengan alasan dimana sebagai tempat jualan yang sudah menjadi tempat para pelanggan hal tersebut menyebabkan kemacetan akibat pembeli yang berhenti di tengah jalan untuk membeli keperluan mereka.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Pedagang kaki lima

---

## **I. PENDAHULUAN**

Hampir kita tidak merasa asing lagi dengan kata kemacetan yang sudah menjadi hal biasa yang sering terjadi di mana saja tentunya di kota-kota besar dan pada saat jam pulang kerja. Sektor informal terutama dalam bentuk usaha PKL yang berkembang cepat di kawasan perkotaan dan menjadi alternatif bagi penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di perkotaan maupun di desa karena orang-orang yang datang ke kota biasanya tidak dibekali kemampuan yang tinggi, sedangkan pada lapangan kerja

sektor formal mensyaratkan kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu sehingga penaja dagangan kaki lima menjadi alternatif untuk memperoleh pendapatan. Permasalahan tentang PKL merupakan permasalahan yang banyak terjadi terutama pada negara miskin seperti hasil penelitian yang telah dilakukan dimana pedagang kaki lima menambah vitalitas di jalanan dan berkontribusi pada kegiatan ekonomi serta penyediaan layanan, namun juga berkaitan dengan kemacetan, risiko kesehatan dan keselamatan, penghindaran pajak dan penjualan yang buruk pada barang dagangan. Keberadaan PKL cukup berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tetapi disisi lain semakin berkembangnya jumlah pedagang kaki lima semakin banyak pula permasalahan yang akan timbul. Perkembangan pedagang kaki lima tersebut akan menutupi ruas-ruas jalan, terkecuali ada ruang yang mendapatkan proteksi dari setiap yang berpenghuni, dengan berusaha menempati lahan yang kosong.

Dengan adanya kebijakan yang dilakukan untuk PKL dipasar Cikereteg tidak membuat pedagang kaki lima menyadari akan zona-zona yang dilarang untuk pedagang kaki lima berjualan, seperti yang terlihat disekitarnya sisi jalan pasar cikereteg yang hampir semua terpenuhi oleh pedagang. Permasalahan yang timbul di pasar cikereteg ini yakni timbulnya kemacetan lalu lintas, kurangnya kesadaran PKL akan kebersihan di sekitar lapaknya, permasalahan parkir yang tidak tertib, gangguan keamanan, banyaknya pengamen dan lain-lain. Permasalahan masalah ini yang disebabkan oleh padatnya aktivitas penjualn atau PKL yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan sehingga membuat pedagang kaki lima menempati zona-zona yang dilarang untuk berjualan seperti di sisi jalan umum.

Berkembangnya dengan zaman tentunya mempengaruhi keadaan kondisi pasar yang berpengaruh dengan tumbuh dan perkembangannya kegiatan perdagangan dipasar cikereteg. Hal ini tentunya mempengaruhi bentuk dan struktur ruang, fungsi bangunan, kondisi infrastruktur pendukung usaha. Permasalahan tentang PKL selalu muncul dari waktu ke waktu, meskipun telah dikeluarkannya kebijakan baru namun masih didapati kesulitan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut dan mendapatkan perlawanan dari pedagang apabila kebijakan tersebut tidak menguntungkan bagi para pedagang. Padahal suatu kebijakan harus diimplementasikan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Permasalahan tersebut diperoleh dari hasil pengamatan, dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengangkatnya menjadi penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Pasar Cikereteg Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor), juga melihat suatu perencanaan sebuah landasan untuk memberikan manfaat lebih bagi PKL dan lingkungan sekitar.

James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17).<sup>→</sup> mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *"a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern"* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Pasar cikereteg ialah pasar tradisional Kabupaten Caringin, pasar cikereteg merupakan fenomena yang terdapat di arah perjalanan menuju tempat pariwisata.

## II. METODOLOGI

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Dimana dalam teknik penelitian data dilakukan dengan dokumentasi, observasi dan wawancara secara langsung untuk mengetahui kebijakan apa saja yang telah dilaksanakan dan pemberdayaan PKL yang ada di pasar cikereteg. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017: 246-253) yang meliputi tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Demikian yang menjadi salah satu fokus dalam penelitian ini ialah fokus terhadap implementasi kebijakan penataan, pengelolaan dan pemberdayaan PKL yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan. Fokus terhadap aspek sosialisasi kebijakan penataan, pengelolaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang meliputi teknik sosialisasi, tim sosialisasi, tempat sosialisasi dan hasil sosialisasi serta faktor pendorong dan penghambat implementasi yang meliputi komunikasi, sumber daya dan struktur organisasi.

## III. HASIL DAN DISKUSI

Pemerintah bukan hanya diam saja dan tidak mengambil kebijakan dimana tindakan yang baru-baru terjadi di lingkungan pasar cikereteg sering terjadinya kemacetan yang diakibatkan oleh PKL dan kendaraan, salah satu objek menimbulkan kemacetan ialah para pengendara masih kurang disiplin dalam mengantri disaat jalanan sedang ramai atau padat dan pengendara yang sedang memasuki jalur keluar dan masuk atau putar balik kendaraan yang seandainya, adanya pengendara kendaraan yang melakukan parkir kendaraan dibadan jalan yang menjadi salah satu penyebab kemacetan, adanya sistem transportasi umum yang tidak bisa menjadi ikon kebanggaan masyarakat dan berhenti seandainya, masih banyaknya kurang sadar para pengguna jalan yang belum tertib dalam mematuhi peraturan, sehingga dapat mengganggu kelancarannya jalur lalu lintas yang dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas sekitar. Salah satunya banyaknya keluar masuk kendaraan pribadi yang melakukan wisata ke daerah tersebut, tentunya di waktu akhir pekan. Mengakibatkan jalanan pasar menjadi cepat rusak dan berlubang dan menimbulkan kemacetan karena jalan tersebut merupakan salah satu jalan menuju tempat wisata.

Akibat banyaknya kendaraan yang sering melintasi jalan pasar cikereteg dan arah menuju daerah wisata dan akibat faktor cuaca yang hujan terus menerus hal ini menyebabkan jalanan menjadi rusak, sehingga pemerintahan menindak lanjut dengan memperbaiki jalanan yang rusak akibat hal tersebut. Akan tetapi dengan adanya perbaikan jalan pasar cikereteg ini menyebabkan kemacetan yang parah sehingga menimbulkan kemacetan panjang yang mana menghambat aktivitas masyarakat setempat, karena dalam pengerjaan jalan pasar cikereteg ini dilakukan pada saat jam aktivitas masyarakat seharusnya pemerintah memperlakukan perbaikan jalan tersebut dilakukan pada saat jam bukan aktivitas masyarakat sehingga tidak menimbulkan kemacetan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Salah satunya para penjualan atau PKL ini yang mana menyebabkan merasa terganggu dengan lahan jualan para PKL untuk berjualan.

Dengan ini pemerintah menyiapkan kebijakan untuk penataan lahan untuk berjualan para PKL yang khusus untuk menjajakan dagangannya, agar tidak berjualan di

pinggir jalan dan terhindar dari kemacetan. Dengan hasil dari mewawancarai salah satu pengguna jalan pasar cikereteg dengan melihat dan menggunakan jalan tersebut berpendapat bahwa “dengan adanya perbaikan jalan ini jalanan menjadi lebih macet, seharusnya pemerintah menugaskan pekerja perbaikan jalan dilaksanakan pada malam hari atau disaat jam jam orang tidak banyak beraktivitas bukan dilaksanakan di jam masyarakat berangkat kerja dan pulang kerja dan aktivitas lainnya,”. Hasil wawancara dari salah satu pedagang kaki lima penjual gorengan “akibat dari jalanan yang rusak oleh kendaraan dan para pedagang juga merasakan akibatnya membuat kemacetan oleh kendaraan yang mana membuat folusi udara sehingga saya harus lebih ekstra dalam menjaga dagang jualan saya”. Dapat disimpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwa kebijakan pemerintah dalam penataannya pedagang sekaligus pemberdayaan untuk para penjualan atau PKL yang harus lebih diperhatikan dan di tempatkan khusus berjualan, bukan pinggir jalan dijadikan sebagai tempat erjualan yang mana dapat menyebabkan kecelakaan dan mengganggu aktivitas pengguna jalan. Sehingga pemerintah harus membuat lahan yang khusus untuk tempat berjualan PKL agar pengguna jalanpun tidak merasa terganggu dan mengalami kemacetan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa tindakan dalam kebijakan pemerintahan ini untuk penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dipasar cikereteg ini sudah berjalan dengan baik. Serta dalam implementasi untuk kebijakan dalam penataan dan pemberdayaan PKL di kawasan pasar cikereteg dihadapi dengan adanya beberapa kendala, antara lain: banyaknya jumlah penjualan atau pedagang luar yang terus bertambah, ketaatan untuk para penjualan atau PKL dalam serta dalam kesediaan sarana dan prasarana di tempat yang kurang memadai serta banyaknya kendaraan masyarakat yang berwisata ke daerah yang melewati jalan pasar cikereteg.

#### **REFERENSI**

- SUGIYONO. 2017. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulthan Suneth, Ibnu dan Hadi Ismanto. Implementasi Kebijakan Publik Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Maharani Abdul, Kartini. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan). Jawa Timur. Universitas Kaltara. 2019.
- Lestari, Dian. Implementasi Kebijakan Pentaan, Pengelolaan, Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Salatiga. Magelang. 2018.

Taufiqurokhman. Kebijakan Publik. Jakarta Pusat: Universitas Moestopo Beragama (Pers).2014.

Ridwan, R., Kusmanto, H., Warjio, W., & Kadir, A. (2020). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 39-47.

Atun, U., & Rusli, Z. (2015). Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Pasar Pagi Arengka kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1), 1-14.

Puspitasari, D. E. (2010). Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 588-606.

Fajrin, A. R. M., & Rahmawati, D. (2016). Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) pada koridor Jalan Pasar Besar Kota Malang. *Jurnal Teknik ITS*, 5(1).

Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. *Jurnal Governansi*, 6(2), 93-103.

Ramdhan, K. M., Sumaryana, A., & Ismanto, S. U. (2017). Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Garut Kota Oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 2(1).

Wibisono, R., & Tukiman, T. (2017). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(2), 55-58.

Pitaloka, A. F., Nuswanto, A. H., & Sihotang, A. P. (2021). IMPLEMENTASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SEMARANG. *Semarang Law Review (SLR)*, 2(3), 176-189.

Sujatna, Y. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(2), 307-314.

Suutomo, R. P. (2014). Implementasi kebijakan pemerintah kota Yogyakarta dalam penataan pedagang kaki lima.